

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Pada bab tinjauan pustaka ini memuat beberapa hasil penelitian sebelumnya dan kerangka teoritis yang berkaitan dengan topik penelitian. Terdapat sejumlah literatur yang membahas topik serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan akan penulis gunakan untuk dijadikan sebagai acuan dalam penelitian. Berikut adalah literatur yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Motivasi Tiongkok Mendirikan <i>Air Defense Identification Zone</i> (ADIZ) di Wilayah Laut China Timur	Khairunnisa Jani Lubis	Dalam literatur Khairunnisa ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Yang mana memandang isu pendirian ADIZ di Senkaku ini dikarenakan adanya persengketaan kepulauan Senkaku/Diayou antara Jepang-China.	Perbedaan antara penelitian Khairunnisa dengan penelitian ini terletak pada fokus ruang lingkup yang diteliti. Dalam penelitian Khairunnisa ini membahas bagaimana tindakan Pemerintah China ini berupaya dalam mempertahankan otoritas dan kedaulatannya atas Kepulauan Diayou/Senkaku; sedangkan penulis menitik beratkan fokus pada sisi pemerintah Jepang dalam mempertahankan kedaulatannya atas Kepulauan Senkaku. Teori

				yang digunakan dalam penelitian pun memiliki perbedaan di mana penelitian Khairunnisa menggunakan perspektif realisme dengan teorinya yakni teori strategi politik luar negeri, serta menggunakan dua konsep yakni kepentingan nasional dan ancaman; sedangkan penulis menggunakan perspektif neorealisme dengan teori <i>security dilemma</i>, dan kebijakan pertahanan sebagai konsepnya. Dan perbedaan yang terakhir adalah periode atau tahun yang diteliti, di mana penelitian Khairunnisa meneliti kebijakan Jepang di tahun 2015; sedangkan penulis meneliti kebijakan Jepang pada tahun 2020 - 2022.
2	Kebijakan Luar Negeri Jepang Terhadap Pemberlakuan Zona Identifikasi Pertahanan Udara Cina	Faustina Tamisari dan Dudy Heryadi	Memiliki kesamaan fokus pada kebijakan luar negeri Jepang dalam merespon pemberlakuan ADIZ China di atas Kepulauan Senkaku. Dalam penelitian Faustina	Perbedaan penelitian Faustina dan Dudy dengan penelitian ini, meskipun menggunakan perspektif yang sama yaitu neorealisme, penelitian Faustina

			dan Dudy ini memiliki kesamaan dengan penulis di mana menggunakan perspektif neorealis dalam penelitiannya.	lebih berfokus pada mengukur menggunakan konsep defensif dan ofensif dalam mengkaji penelitiannya; sedangkan peneliti disini menggunakan <i>security dilemma</i> sebagai teori dan konsep kebijakan pertahanan sebagai untuk membantu dalam proses penelitian. Selain itu juga ada perbedaan periode waktu, di mana penelitian Faustina dan Dudy melihat perubahan kebijakan pertahanan Jepang pada tahun 2013; sedangkan penelitian ini melihat perubahan kebijakan pertahanan Jepang pada kurun waktu tahun 2020 - 2022;
3	Kebijakan Remiliterisasi Shinzo Abe Ditinjau dari <i>Two Level Games Theory</i>	Tino Rila Sebayang dan Muhammad Syakir Sopyan	Dalam literatur yang ditulis oleh Tino dan Syakir ini memiliki kesamaan dalam menggunakan perspektif penelitiannya, di mana dalam penelitian Tino dan peneliti ini menggunakan perspektif neorealisme. Selain itu kesamaan	Perbedaan dalam penelitian Tino dengan penelitian ini terletak pada periode kepemimpinan Jepang, di mana penelitian Tino ini meneliti pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe; sedangkan penelitian ini tidak berhenti hanya

			lainnya adalah membahas strategi militer yang dilakukan Jepang yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk kebijakan sebagai upaya pertahanan negaranya.	sampai Shinzo Abe saja melainkan hingga setelah kepemimpinan Abe yakni era kepemimpinan Perdana Menteri Yoshihide Suga dan Perdana Menteri Fumio Kishida sampai di tahun 2022. Perbedaan selanjutnya terletak pada penggunaan teori, di mana meski memiliki kesamaan dalam menggunakan perspektif neorealisme, dalam penelitian Tino menggunakan <i>two level games theory</i> sebagai alat analisisnya; sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori <i>security dilemma</i> .
4	<i>China's Air Defense Identification Zone (ADIZ) and its Impact on the Territorial and Maritime Disputes in the East and South China Seas</i>	Taisaku Ikeshima	Literatur yang ditulis oleh Taisaku memiliki kesamaan dengan dengan penelitian ini yaitu melihat bagaimana implikasi China yang mendirikan Zona Identifikasi Pertahanan Udara atau ADIZ. Di dalam penelitian Taisaku juga memiliki kesamaan lain dengan penelitian ini di mana melihat salah satunya tentang bagaimana respon	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Taisaku ini terletak pada ruang lingkup penelitiannya, di mana penelitian Taisaku ini menyeluruh, mencakup negara-negara kawasan di Laut China Selatan dan Laut China Timur; sedangkan penelitian ini hanya memfokuskan pada dampak yang ditimbulkan setelah China

			negara di Asia Timur terkhusus Jepang.	memberlakukan ADIZ di Laut China Timur khususnya Jepang saja. Selain itu perbedaan dalam penelitian Taisaku dengan penelitian ini juga berbeda secara penggunaan teori, di mana penelitian Taisaku menggunakan teori <i>maritime claims</i> serta territorial and <i>maritime disputes</i> sebagai alat analisisnya; sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori <i>security dilemma</i> . Periode penelitiannya pun berbeda di mana Taisaku meneliti pada tahun 2013 – 2015; sedangkan penelitian ini melihat fenomena ADIZ ini dari tahun 2020 – 2022.
5	Respon Jepang dan Korea Selatan terhadap Penerapan <i>Air Defense Identification Zone</i> (ADIZ) oleh Tiongkok di Laut Tiongkok Timur	Rosalia Jasmine	Persamaan dengan penelitian Rosalia dengan penelitian ini terletak pada melihat bagaimana Jepang merespon pemberlakuan ADIZ China pada tahun di Laut China Timur.	Perbedaan dalam penelitian Rosalia dan penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang diteliti, di mana penelitian Rosalia ini mencakup dua negara yakni Jepang dan Korea Selatan dalam merespon penerepan ADIZ China; sedangkan dalam penelitian ini

				hanya berfokus pada Jepang saja. Perbedaan yang selanjutnya terletak pada penggunaan teori dalam penelitiannya, di mana Rosalia menggunakan perspektif konstruktivisme dengan teorinya yakni identitas nasional serta teori <i>aspirational constructivism</i>; sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perspektif neorealisme dan <i>security dilemma</i> sebagai teorinya. Pada periode tahun penelitian pun berbeda, di mana penelitian Rosalia ini melihat bagaimana Jepang merespon terhadap ADIZ China pada tahun 2013; sedangkan penelitian ini melihat pada tahun 2020 – 2022.
--	--	--	--	--

Literatur pertama yaitu jurnal yang berjudul **Motivasi Tiongkok Mendirikan Air Defense Identification Zone (ADIZ) di Wilayah Laut China Timur**. Dalam penelitian ini menjelaskan alasan dibalik pembentukan ADIZ China di Laut China Timur. Di mana pada tanggal 23 November 2013, Kementerian Pertahanan Nasional Republik Rakyat China membentuk Zona Identifikasi

Pertahanan Udara di Laut Cina Timur. Di dalam penelitian ini memaparkan bahwa China gigih untuk mempertahankan klaim kedaulatannya atas Pulau Senkaku. ADIZ yang didirikan oleh China ini mencakup Kepulauan Senkaku yang memang menjadi Kepulauan Sengketa antara China dan Jepang. Berdasarkan temuan penelitian ini, jelas bahwa pembentukan ADIZ merupakan bagian dari upaya China untuk menegaskan otoritas hukum dan administratif atas Kepulauan Senkaku dengan mempertahankan kedaulatan China atau keamanan wilayah atau ruang udara China. Ini adalah langkah pembalasan yang diambil sebagai tanggapan atas rencana Jepang untuk menasionalisasi pulau-pulau tersebut, dalam kasus ini adalah Kepulauan Senkaku (Lubis, 2015). Dari penelitian ini penulis menjadi paham akan motif China atas tindakan yang dilakukan. Literatur ini yang kemudian menjadi sumber rujukan yang membantu penelitian ini untuk menemukan atau membangun sebuah asumsi atas motivasi apa yang dilakukan China dalam penerapan ADIZ di Kepulauan Senkaku.

Literatur kedua yaitu jurnal yang berjudul **Kebijakan Luar Negeri Jepang Terhadap Pemberlakuan Zona Identifikasi Pertahanan Udara Cina**. Di mana dalam jurnal ini menjelaskan bahwa sengketa teritorial atas Kepulauan Senkaku ini muncul sebagai isu yang sangat mengemuka di kawasan Asia Timur. Status teritorial Kepulauan Senkaku yang memang telah menjadi subyek sengketa antara Jepang dan Cina sejak tahun 1970-an. Konflik tersebut mengalami eskalasi pada tahun 2013 dengan pembentukan Zona Identifikasi Pertahanan Udara oleh China. Setelah pembentukan zona ini, baik China maupun Jepang telah menanggapi setiap tindakan yang diambil satu sama lain untuk mempertahankan klaim masing-masing atas Kepulauan Senkaku. Dalam penelitian ini juga memaparkan bagaimana Jepang

merespon pendirian ADIZ ini melalui kebijakan-kebijakan sebagai strategi pertahanannya. Selain itu dalam jurnal penelitian ini juga menekankan bahwa kebijakan yang dikeluarkan Jepang ini merupakan salah satu bentuk penolakan Jepang atas ADIZ China di atas Kepulauan Senkaku (Tamisari & Heryadi, 2017). Melalui jurnal ini dapat membantu penulis dalam memahami bagaimana sikap Jepang atas China dalam merespon ADIZ melalui perspektif realisme ofensif dan defensif. Di mana kebijakan yang dikeluarkan Jepang dapat dianalisa dengan realisme defensif, sedangkan China melalui realisme ofensif.

Literatur ketiga yaitu jurnal yang berjudul **Kebijakan Remiliterisasi Shinzo Abe Ditinjau dari *Two Level Games Theory***. Dalam jurnal ini mengkaji tentang kebijakan pertahanan Jepang di bawah pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe yang menerapkan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan peran militer (remiliterisasi) dalam menjaga kedaulatan negara dan memelihara stabilitas dalam dinamika keamanan kawasan Asia Timur. Namun, kebijakan remiliterisasi ini justru bertentangan dengan status Jepang sebagai negara pasifis, sebagaimana digariskan dalam Konstitusi Jepang Pasal 9 Tahun 1947. Di mana Konstitusi pasifis ini secara eksplisit berkaitan dengan batasan yang dikenakan pada Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF) sehubungan dengan keterlibatannya dalam penyelesaian sengketa internasional (Sebayang & Sopyan, 2022).

Dalam jurnal ini juga memaparkan kerja sama keamanan yang diupayakan oleh Jepang. Di mana Jepang telah mempercayakan urusan keamanan internasionalnya kepada Amerika Serikat (*American Umbrella*). Dalam konteks hubungan internasional, perluasan tanggung jawab Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF), yang dicapai dengan meningkatkan kerja sama keamanan dengan Amerika

Serikat dan negara-negara sekutu lainnya di kawasan, memainkan peran penting dalam membentuk hasil yang saling menguntungkan. Jurnal ini memaparkan analisis menggunakan analisis *two level games*, di mana kebijakan remiliterisasi merupakan pendekatan yang strategis, yang dianggap cocok bagi Jepang sendiri dalam mengatasi ketidakpastian keamanan regional yang dinamis (Sebayang & Sopyan, 2022). Dalam jurnal ini menunjukkan keberhasilan Jepang atas kebijakan remiliterisasi dengan adanya pertimbangan baik secara level internasional maupun level domestik. Maka dari itu jurnal ini yang kemudian penulis jadikan sebagai sumber rujukan dalam penelitian ini.

Literatur keempat yaitu jurnal yang berjudul ***China's Air Defense Identification Zone (ADIZ) and its Impact on the Territorial and Maritime Disputes in the East and South China Seas***. Dalam jurnal ini mengkaji dua aspek utama: pertama, implikasi dari pembentukan Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) China terhadap negara-negara yang terlibat di Laut China Timur, yaitu Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Amerika Serikat; dan kedua, potensi China untuk menetapkan ADIZ di Laut China Selatan. Terdapat tiga argumen penting dalam jurnal ini diantaranya: pertama, diperlukan jangka waktu yang lama untuk menilai dampak Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) secara menyeluruh; kedua, China, Jepang, Korea Selatan, dan pihak terkait lainnya harus memprioritaskan diskusi untuk langkah-langkah membangun kepercayaan dan mengendalikan krisis di Laut China Timur dan Laut China Selatan; ketiga, bahwa untuk memahami kebangkitan China sebagai kekuatan di kawasan itu harus melihat tantangannya dan/atau perubahan status quo di kawasan Asia Timur secara teliti dan objektif (Ikeshima, 2016). Dalam jurnal ini memunculkan temuan bahwa

adanya implikasi pembentukan ADIZ China yang tidak hanya dengan Jepang, namun juga dengan negara-negara yang terlibat di Laut China Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Maka dari itu, penulis jadikan jurnal ini sebagai rujukan untuk melihat bagaimana implikasi ADIZ China ini terhadap Jepang.

Literatur yang kelima yakni jurnal dengan judul **Respon Jepang dan Korea Selatan terhadap Penerapan Air Defense Identification Zone (ADIZ) oleh Tiongkok di Laut Tiongkok Timur**. Dalam jurnal ini memaparkan bahwa setelah adanya ADIZ China ini, identifikasi, lokasi, dan kontrol penerbangan diberlakukan di zona tersebut. Dengan adanya isu penerapan Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) China ini, Jepang dan Korea Selatan menunjukkan reaksi yang berlawanan, meskipun memiliki perselisihan teritorial yang sama terkait ADIZ dan status mereka yang sama-sama sebagai sekutu Amerika Serikat. Hal tersebut dikarenakan budaya strategis dan citra diri nasional yang berbeda antar kedua negara. Budaya strategis Jepang termasuk menjaga keamanan nasional dengan penuh semangat, menjauhkan diri dari China, menegakkan supremasi hukum, dan menganggap China sebagai bahaya (Jasmine, 2018). Jurnal ini menggunakan teori identitas nasional dalam menganalisis perilaku negara seperti Jepang dan Korea Selatan dalam sistem internasional. Maka dari itu, penulis menjadikan jurnal ini sebagai rujukan dalam penelitian ini.

2.2. Kerangka Teoritis/Konseptual

2.2.1. Neorealisme

Pengertian neorealisme sebagaimana yang dikemukakan oleh Mearsheimer (dalam Dugis, 2016) bahwa neorealisme ini muncul sebagai perspektif kritis yang

berbeda dengan asumsi fundamental realisme yang menempatkan sifat manusia sebagai penentu utama dinamika kekuasaan dalam ranah hubungan internasional. Menurut perspektif neorealis, kehadiran sifat konfliktnal manusia tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap perilaku negara dalam ranah politik internasional. Neorealisme berpendapat bahwa kerangka anarki internasional lebih berpengaruh dikarenakan kerangka ini memaksa negara untuk terlibat dalam mengambil langkah atau tindakan yang tegas. Ketidakpastian dalam lingkungan internasional yang anarki ini yang menjadi ciri arena politik internasional memaksa negara-negara untuk secara aktif mengupayakan pencapaian kapasitas keamanan dan kekuasaan yang optimal.

Menurut perspektif neorealis yang sebagaimana diutarakan oleh Mearsheimer, terdapat fokus pada pentingnya sistem internasional yang menunjukkan stabilitas, konsistensi, dan memberikan pengaruh pada ‘pemain’ internasional (Dugis, 2016). Sejalan dengan prinsip realisme klasik, neorealisme juga berpendapat bahwa dinamika fundamental politik internasional berkisar pada kompetisi dan persaingan kekuasaan. Hanya saja dalam neorealisme tidak menjelaskan sifat manusia sebagai penentu utama dinamika dalam hubungan internasional, neorealisme bertujuan untuk menjelaskan bagaimana ruang lingkup yang lebih luas dari lanskap politik di seluruh dunia.

Menurut Booth (2011: 5) (dalam Dugis, 2016), neorealisme memberikan penjelasan tentang keadaan sistem internasional, yang melibatkan perebutan kekuasaan, dengan menghubungkannya dengan struktur anarkis yang dominan. Neorealisme lebih lanjut menjelaskan dinamika hubungan antar komponen sistem, terutama negara di mana saat mereka berjuang untuk bertahan hidup di tengah persaingan internasional. Persaingan ini ditandai dengan pola distribusi kekuatan yang khas, yang dikenal sebagai kapabilitas unit.

Realisme klasik lebih menekankan pada studi tentang perilaku manusia dan peran agen, yaitu negara, dalam membentuk struktur internasional. Sebaliknya, neorealisme mengarahkan perhatiannya pada struktur internasional dan dampaknya terhadap perilaku aktor, khususnya negara. Neorealisme diilhami oleh tradisi behavioralis, karena berusaha memberikan teori fundamental tentang perilaku negara yang mampu menjelaskan perilaku negara secara umum dalam berbagai keadaan.

Menurut kaum neorealis, khususnya Waltz, tindakan negara sering kali dibentuk oleh sistem internasional yang menjadi latar belakang politik global. Neorealisme berpendapat bahwa politik internasional berputar pada pengejaran kekuasaan. Namun, para pendukung neorealisme berpendapat bahwa perilaku negara yang seringkali dipengaruhi oleh keadaan tertentu, terutama dibentuk oleh karakter anarkis sistem internasional dan bukan kecenderungan inheren menuju konflik dalam sifat manusia (Dugis, 2016).

Menurut Waltz (1979), kehadiran anarki dalam sistem internasional memaksa negara-negara untuk mengambil tindakan apa pun yang dianggap penting untuk mempertahankan diri mereka sendiri, meskipun kemungkinan besar akan terjadi konflik antar negara. Berdasarkan penalaran Waltz, negara akan dipaksa karena kendala sistem anarkis untuk mengoptimalkan keamanannya (Waltz, 1979). Hal tersebut pada akhirnya mengakibatkan negara-negara turun ke situasi yang ditandai dengan ketidakpercayaan. Skeptisisme yang tersebut muncul dari adanya kesukaran dalam memahami secara pasti motivasi mendasar yang mendorong tindakan suatu negara (Mearsheimer, 2013: 79). Ketidakpastian yang ada menumbuhkan kecenderungan untuk berargumen bahwa negara-negara (sebagai aktor internasional) secara konsisten berjalan dalam kondisi kewaspadaan yang tinggi,

sehingga memprioritaskan peningkatan kekuatan atau kapasitas militer mereka (Dugis, 2016).

Berdasarkan perspektif neorealisme tersebut, Jepang di sini mengeluarkan kebijakan pertahanan atas dasar dorongan dari kondisi sistem internasional yang anarki. Sebagaimana yang diutarakan Pratama (dalam Pratama, 2022) bahwa Jepang menjadi sebuah negara yang mengarahkan pendirian yang sebelumnya merupakan negara pasifis menjadi negara yang lebih pasifis aktif. Jepang memperkuat kekuatan militer serta memperluas jangkauan strategi pertahanan dan keamanan negaranya. Maka dari itu, penulis menggunakan neorealisme ini sebagai sebuah perspektif yang kemudian dapat menjelaskan bagaimana Jepang sebagai negara dapat mempertahankan keamanan negaranya di tengah sistem internasional yang anarki. Karena selaras yang dinyatakan oleh Waltz bahwa memang kehadiran anarki dalam sistem internasional memaksa negara-negara untuk mengambil tindakan apa pun yang dianggap penting untuk mempertahankan diri mereka sendiri, meskipun kemungkinan besar akan terjadi konflik antar negara. (Waltz, 1979)

Tentunya langkah Jepang untuk mengeluarkan kebijakan pertahanan untuk melindungi keamanan nasionalnya atas respon penerapan ADIZ China di sekitar pulau Senkaku ini juga kemudian dibalut dengan konsep kebijakan pertahanan. Menjaga keamanan suatu negara ini diperlukannya beberapa strategi, seperti menggunakan langkah-langkah diplomatik untuk membentuk aliansi dan mengisolasi potensi ancaman, serta memanfaatkan pengaruh ekonomi untuk membina kerja sama dengan negara lain, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan keamanan nasional secara menyeluruh. Berdasarkan yang diutarakan oleh

Pinto (dalam Simorangkir, 2020) bahwa, beberapa negara besar terlibat dalam bersekutu secara langsung dan tidak langsung dengan negara lain untuk membangun dan mempertahankan kekuatan militer yang efisien. Perlindungan keamanan suatu negara dapat dicapai dengan memaksimalkan penggunaan kekuatan militer secara efektif. Konsep Kepentingan Nasional berkaitan dengan yang namanya kelangsungan hidup suatu negara serta melindungi negara dari bahaya apa pun. Menurut T. May Rudi, kepentingan nasional dapat diartikan sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara atau negara dalam rangka mempertahankan integritasnya atau mencapai status yang diinginkannya (Simorangkir, 2020).

Barry Buzan (dalam Simorangkir, 2020) berpendapat bahwa konsep keamanan nasional sangat berkaitan dengan yang namanya kesejahteraan individu akan adanya keamanan terhadap masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, perlindungan keamanan masyarakat ini berkontribusi terhadap pencapaian keamanan nasional. Tanggung jawab utama negara adalah memberikan perlindungan dan keamanan bagi warga negaranya. Keamanan Nasional adalah bidang studi yang berpusat pada pengembangan dan implementasi kebijakan publik yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan dan perlindungan suatu bangsa. Hal ini dapat dicapai melalui langkah strategis seperti pengaruh ekonomi, kapabilitas militer, serta upaya diplomatik, baik dalam kondisi berdamai ataupun berperang.

Menurut Collin S. Gray, strategi dapat didefinisikan sebagai penggunaan teoritis dan praktis, serta potensi pemanfaatan kekuasaan terstruktur untuk mencapai tujuan politik. Gray berpendapat bahwa penggunaan atau potensi pemanfaatan kekuatan didorong oleh motif politik yang melekat pada sifat

dasar manusia. Gray juga mengemukakan bahwa pembuat kebijakan diharuskan memiliki pemahaman secara menyeluruh tentang instrumen militer yang ingin mereka gunakan. Selain itu juga ia menekankan keutamaan kebijakan, dengan menegaskan bahwa hasil yang diinginkan harus menentukan metode yang digunakan. Oleh karena itu, konsep strategi melibatkan pengelolaan yang cermat dan penyelarasan sarana dan tujuan, yang dihubungkan melalui penggunaan kekuatan potensial atau aktual sebagai alat strategis. Seorang ahli strategi yang mahir berdasarkan pandangan Gray, ia akan mempunyai kemampuan untuk secara efektif menyesuaikan cara dan tujuan, akan menyadari bahwa kemenangan yang berkelanjutan memerlukan pembentukan tatanan internasional yang dapat diterima oleh musuh-musuhnya (Field, 2022).

Clausewitz (dalam Field, 2022) menegaskan bahwa strategi merupakan faktor utama yang memiliki “keterlibatan” yang digunakan dalam suatu pertempuran militer untuk mencapai tujuan akhir suatu konflik. Clausewitz secara efektif mengagaskan konsep "keterlibatan" untuk berbagai alat kekuasaan, baik dalam bentuk ancaman maupun tindakan, untuk mencapai tujuan tata negara. Sejalan dengan perspektif Clausewitz, Gray berpendapat bahwa strategi mencakup penggunaan ancaman baik secara implisit dan eksplisit, adanya “keterlibatan” untuk mencapai tujuan politik. Gray menegaskan bahwa tindakan ancaman dan penggunaan kekuatan tidak memiliki validitas yang melekat. Ia menggaris bawahi bahwa signifikansi politik dari aksi militer bergantung pada dampak strategisnya.

Dengan demikian, penulis menggunakan perspektif neorealisme dan menggunakan konsep kebijakan pertahanan untuk membangun asumsi serta

sebagai kerangka dasar berpikir dalam penelitian ini. Karena dalam kasus ini, dalam perspektif neorealisme, Jepang dihadapkan dengan kondisi sistem internasional yang anarki, oleh karenanya Jepang harus menyesuaikan dirinya, dengan mengambil langkah tegas lalu dituangkan dalam kebijakan seperti halnya memberlakukan *National Defense Strategy* sebagai salah satu upaya Jepang untuk melindungi Kepulauan Senkaku pasca ADIZ China ini diterapkan di sekitar sana.

2.2.2. Security Dilemma

Pengertian *Security Dilemma* menurut Waltz (dalam Syahrin, 2018) bahwa dilema keamanan ini mengacu pada situasi di mana upaya suatu negara untuk meningkatkan kemampuan militernya dianggap sebagai ancaman oleh negara lain, membuat mereka merespons dengan memperkuat kekuatan militer mereka sendiri. Perlombaan senjata akhirnya muncul sebagai dampak dari adanya saling curiga antar negara di kawasan.

Menurut Herbert Butterfield, dilema keamanan berpotensi memaksa negara untuk terlibat dalam peperangan, bahkan dalam kasus di mana mereka tidak memiliki niat untuk merugikan satu sama lain. Butterfield berpendapat bahwa terjadinya konflik dapat terjadi meski tanpa adanya keterlibatan aktor 'jahat' yang berusaha dengan sengaja menimbulkan kerugian dalam skala global. Ini memiliki potensi untuk dihasilkan melalui kolaborasi dua negara dominan, yang keduanya sangat peduli untuk menghindari segala bentuk konfrontasi. Tulisan Butterfield mencakup enam proposisi yang berkaitan dengan konsep dilema keamanan diantaranya: (1) Asal muasal rasa takut, yang berasal dari "dosa universal umat

manusia", berfungsi sebagai sumber utamanya; (2) Ketakutan mengharuskan kehadiran ketidakpastian tentang niat atau tujuan negara lain; (3) Itu muncul secara tidak sengaja, tanpa maksud yang disengaja; (4) Konsekuensi dari rasa takut sering mengarah pada hasil yang tragis; (5) Faktor psikologis berpotensi mengintensifkan rasa takut; (6) Ketakutan diidentifikasi sebagai penyebab mendasar dari semua konflik manusia.

Herz memandang bahwa security dilemma ini adalah situasi “apakah manusia 'secara alami' damai dan kooperatif, atau justru agresif dan mendominasi bukanlah hal yang menjadi pertanyaannya. "Homo homini lupus" lah yang menjadikan elemen mendasar dari keberadaan sosial manusia karena ketidakpastian dan kepedulian manusia terhadap niat sesamanya. Dalam lingkaran dilema keamanan, akan muncul sikap mempertahankan diri mendorong persaingan untuk mendapatkan kekuasaan. Herz berpendapat bahwa masalah keamanan itu muncul karena adanya ketidak sengajaan. Herz mengklaim bahwa masalah keamanan berasal dari negara-negara yang mengumpulkan kekuatan untuk keamanan mereka sendiri karena ketakutan dan ketidak jelasan tentang niat negara lain di bawah sistem dunia yang anarki yang menunjukkan bahwa masalah keamanan itu memanglah tidak disengaja.

Jervis mendefinisikan dilema keamanan sebagai hasil yang tidak terduga dan tidak diinginkan dari aktivitas perlindungan yang dilakukan oleh sebuah negara. Jervis menyatakan bahwa banyak taktik atau strategi keamanan suatu negara yang justru dapat merugikan negara lain. Jervis juga menekankan bahwa keamanan satu negara mungkin tanpa disadari dapat mengancam negara lain. Jervis juga mengklaim bahwa dalih dilema keamanan bergantung pada gagasan bahwa ketika

satu negara meningkatkan keamanannya hal itu dapat membahayakan negara lain. Sistem internasional yang anarki inilah yang menyebabkan munculnya dilema keamanan ini.

Tang mendefinisikan dilema keamanan sebagai situasi di mana negara di dunia dalam situasi yang anarki, di mana ada dua negara atau lebih yang menggunakan pandangan realisme defensif untuk melindungi keamanan mereka sendiri daripada mengancam satu sama lain. Namun, tidak ada negara yang mengetahui tujuan negara lain. Jadi, kedua belah pihak takut akan sifat ‘predator’ satu sama lain. Kedua belah pihak menginginkan kekuasaan karena mereka percaya itu akan membawa keamanan pada negaranya sendiri. Realis defensif percaya bahwa dilema keamanan memungkinkan pemerintah atau negara untuk bekerja sama atau beraliansi dengan negara lain untuk melawan musuh bersama. (Tang, 2009).

Selaras dengan yang dinyatakan oleh Tang, Jepang memilih untuk menjadikan Amerika sebagai aliansi keamanan negara Jepang. Meskipun pada akhirnya hal tersebut justru memperumit hubungan antara negara di kawasan Asia Timur itu sendiri (Syahrin, 2018). Oleh karena itu, penulis menggunakan teori *security dilemma* ini sebagai teori yang dapat menunjang penelitian ini. Kekuatan Pasukan Bela Diri (SDF) Jepang ini masih dirasa kurang bagi Jepang untuk melindungi keamanan negaranya, apalagi setelah ADIZ China diterapkan di sekitar Kepulauan Senkaku. Jepang menjadi resah akan hal tersebut karena dianggap sangat berbahaya, di mana bisa saja China memperburuk situasi dengan mengubah status quo secara sepihak, yang justru dapat menimbulkan dampak yang tidak diharapkan bagi Jepang sendiri (Japan Ministry of Defense, 2022).

Berdasarkan apa yang dipaparkan dalam Japan National Defense Strategy 2022, Jepang menyatakan bahwa China semakin menjadi lebih intensif dalam melaksanakan kegiatan militernya di sekitaran Kepulauan Senkaku (Japan Ministry of Defense, 2022). Oleh karena itu, eskalasi China ini bisa dianggap lebih mengerikan. China juga terus menerus melakukan percobaan untuk berupaya mendapatkan status quo atas Kepulauan Senkaku (Japan Ministry of Defense, 2022). Hal itu dilakukan China bahkan setelah Jepang beraliansi dengan AS. Maka dari itu, strategi Jepang untuk beraliansi dengan Amerika Serikat ini yang justru menimbulkan dilema keamanan bagi Jepang itu sendiri. Di mana sudah menjadi rahasia umum bahwa AS merupakan aktor yang pada saat ini dapat menyeimbangkan kekuatan China. Dengan demikian, China pun justru sama meningkatkan aktivitas militernya di sekitar Kepulauan Senkaku yang justru meningkatkan kompleksitas di kawasan Asia Timur. Namun di sisi lain, Jepang kurang berdaya apabila tidak menjalin aliansi dengan Amerika Serikat dalam bidang pertahanannya.

2.3. Asumsi Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan sumber literatur yang telah dipaparkan sebelumnya, memunculkan sebuah asumsi bahwa: serangkaian orientasi perubahan kebijakan pertahanan Jepang dipengaruhi salah satunya oleh dilema keamanan Jepang atas China di Kepulauan Senkaku khususnya pasca penerapan *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) oleh China di Kepulauan Senkaku.

2.4. Kerangka Analisis

